

# SKRIPSI

## ASPEK HUKUM PENERBITAN CHARGE CARD PADA BANK SYARIAH

Per III / 05

Ros  
a

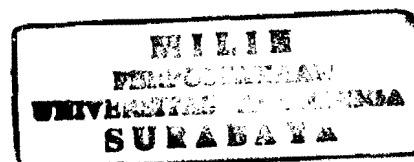


OLEH :

**RIZKI ROSALIA**

**NIM : 030115286**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**ASPEK HUKUM PENERBITAN  
CHARGE CARD PADA BANK  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



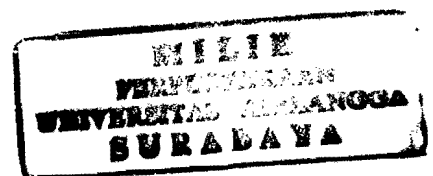
**Trisadlni P. Usanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 059 088**

**Penyusun,**



**Rizki Rosalia**  
**NIM : 030115286**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Masalah penerbitan *charge card* oleh bank syariah ini dalam hukum Islam termasuk bidang hukum “*ijtihadiah*”, karena dalam hukum Islam tidak ada yang secara eksplisit mengatur tentang *charge card*. Sehingga untuk menentukan hukumnya halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran dari para ulama ahli *fiqh*. Para ulama ahli *fiqh* memandang terdapat beberapa unsur dalam syariah *charge card* yang perlu dikaji apakah diperbolehkan dalam hukum Islam. Unsur-unsur itu adalah penerapan denda keterlambatan, serta *fee* dari *merchant* pada bank penerbit kartu. Dan setelah dikaji ternyata dalam unsur-unsur tersebut pada umumnya tidak mengandung riba dan diperbolehkan dalam hukum Islam.
- b. Konsep dasar *charge card* yang diterbitkan bank syariah merupakan alat identifikasi pribadi yang digunakan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam mekanismenya, *charge card* yang diterbitkan oleh bank syariah memiliki beberapa ketentuan baku dalam penggunaannya, yaitu tidak menggunakan sistem bunga, tidak terdapat fasilitas angsuran, hanya dapat digunakan pada transaksi yang bersifat halal saja, hanya dapat dimiliki oleh nasabah dengan kemampuan finansial yang cukup baik, serta

terdapat batas maksimal transaksi di dalamnya. Pada transaksi dalam syariah *charge card* ini melibatkan empat pihak yaitu bank syariah penerbit kartu, operator kartu (*Visa* dan *Master Card*), nasabah pemegang kartu, serta *merchant*. Dalam hubungan antara pihak-pihak itu terdapat perjanjian atau akad sebagai landasannya. Mekanisme transaksi dalam syariah *charge card* hampir sama dengan mekanisme transaksi dalam kartu kredit bank konvensional. Demikian juga dengan biaya-biaya yang dibebankan terhadap nasabah pemegang kartu. Bank penerbit kartu dapat melakukan beberapa upaya apabila pemegang kartu itu melakukan wanprestasi.

## 2. Saran

- a. Hendaknya penggunaan syariah *charge card* ini lebih disosialisasikan lagi oleh bank syariah penerbit pada masyarakat luas, terutama pada masyarakat yang beragama Islam. Dengan sosialisasi itu diharapkan masyarakat jadi lebih mengetahui tentang keberadaan syariah *charge card* itu sehingga dapat memanfaatkan penggunaannya. Selain itu, perkembangan syariah *charge card* perlu lebih ditingkatkan lagi dengan mencari strategi pengembangan yang efektif dan halal agar mampu berkompetisi atau memiliki nilai jual yang lebih dengan *charge card* atau *credit card* yang diterbitkan oleh bank konvensional.
- b. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada penggunaan syariah *charge card* agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang harus ada pada kartu ini.